



Judul : DPR-Pemerintah Labrak Larangan Ke Luar Negeri
Tanggal : Selasa, 04 Januari 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1-8

BAHAS IBU KOTA NEGARA, KUNKER KE KAZAKHSTAN

DPR-Pemerintah Labrak Larangan Ke Luar Negeri

DI tengah serbuan Covid-19 varian Omicron, DPR dan Bappenas tetap terbang ke Kazakhstan buat studi banding pemindahan Ibu Kota Negara. Duh, DPR dan Bappenas labrak larangan ke luar negeri.

Penyebaran Omicron di luar negeri sangat tinggi. Kondisi ini membuat pemerintah khawatir. Bahkan, pasien Omicron yang ada di Indonesia juga banyak terinveksi dari luar negeri.

Untuk mengantisipasi penyebaran Omicron, Presiden sudah melarang pejabat negara untuk ke luar negeri. Hal senada dilakukan oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPR yang menunda seluruh agenda dinas ke luar negeri.

Namun, aturan itu tersebut rupanya tak dijalankan oleh Pansus Ibu Kota Negara DPR dan Bappenas. Pasalnya, mereka tetap melakukan kunker ke Kazakhstan untuk studi banding pemindahan Ibu Kota Negara.

Kepergian mereka dibenarkan oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Menurut dia, hanya tiga anggota DPR yang memenuhi undangan Bappenas. Mereka yakni; Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia, serta dua anggotanya; Achmad Baidowi dan Yanuar Prihatin.

Menurut Indra Iskandar, kunjungan ke Kazakhstan berlangsung sejak Minggu (2/1) hingga Rabu (5/1). Meski membenarkan, Indra mengatakan, ini bukan agenda DPR, tapi Bappenas.

"DPR ke sana (Kazakhstan) atas undangan pemerintah, itu bukan agenda kunker,"

◆ BERSAMBUNG KE HAL 8

Pansus IKN DPR Ke Kazakhstan Undangan Bappenas

DPR-Pemerintah
... DARI HALAMAN 1

ujarnya.

Indra memastikan, setelah kembali dari Kazakhstan, seluruh anggota dewan akan mengikuti prosedur karantina. Menurutnya, DPR akan mematuhi segala ketentuan yang sudah dibuat pemerintah.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco dikritik angkat bicara. Menurut dia, terkait dengan keberangkatan anggota DPR

ke Kazakhstan sudah disepakati bersama-sama dengan pemerintah.

Kenapa masih berangkat di tengah larangan ke luar negeri? Dasco mengatakan, ada pejabat yang mendapat pengecualian. Yakni, yang mewakili tugas penting negara dan undangannya tidak bisa dibatalkan.

Bagaimana tanggapan Bappenas? Sampai tadi malam pihak Bappenas belum bersuara.

Sikap DPR dan Bappenas ini pun menimbulkan pro dan kontra. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review,

Ujang Komarudin mestinya, DPR dan pemerintah taat aturan.

"Apalagi larangan keluar negeri demi keselamatan bersama dan terhindar dari Omicron," ujarnya, kemarin.

Dia juga mengkritik DPR dan pemerintah tetap ngotot bahas pemindahan Ibu Kota Negara.

Menurut dia, di tengah pandemi dan masih belum membaiknya ekonomi, sebaiknya fokus pada penanganan kesehatan dulu.

"Kalau melanggar harusnya ada sanksi," tukasnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menganggap kunjungan ke Kazakhstan tepat. Karena keberhasilan mereka membangun ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Namun, kunjungan ini tidak seharusnya dilakukan DPR atau Bappenas. Melainkan oleh tim yang secara langsung membangun fisik dan ekosistem Ibu Kota Negara. Dan tentunya, menggunakan anggaran yang memang dialokasikan untuk IKN, bukan anggaran lain. ■ MEN